

## MENGUNGKAP KECURANGAN AKUNTANSI: DAMPAK MORALITAS APARAT DAN ASIMETRI INFORMASI DENGAN PENGENDALIAN INTERNAL SEBAGAI MODERASI

**Susanti**

Universitas Pasir Pengaraian

\*corresponding author: [susanti@upp.ac.id](mailto:susanti@upp.ac.id)

**Heffi Christya Rahayu**

Universitas Pasir Pengaraian

**Zulkarnain**

Universitas Pasir Pengaraian

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui pengaruh moralitas aparat, asimetri informasi terhadap kecurangan akuntansi. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menguji apakah variabel pengendalian internal memoderasi hubungan antara masing-masing variabel moralitas aparat dan asimetri informasi terhadap kecurangan akuntansi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian *kuantitatif*. Karena data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *data primer*. Populasi penelitian adalah di Satuan Kerja Perangkat Daerah yang terdapat 29 SKPD yang terdiri dari Inspektorat, Badan dan Dinas. Dalam penelitian ini pemilihan sampel menggunakan metode *total sampling*. Metode analisis data menggunakan analisis *path* (jalur) dengan menggunakan model *SEM (Structural Equation Modeling)* atau Model Persamaan Struktur dengan program *Warp PLS 6.0*. Kesimpulan dari hasil pengujian hipotesis pertama yaitu moralitas aparat pemerintah berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi, hipotesis ke dua yaitu asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecurangan akuntansi, hipotesis ke tiga yaitu pengendalian internal tidak dapat memoderasi hubungan antara moralitas aparat pemerintah dengan kecurangan akuntansi dan hipotesis ke empat yaitu pengendalian internal dapat memoderasi hubungan antara asimetri informasi dengan kecurangan akuntansi.

**Kata Kunci** : Moralitas Aparat, asimetri informasi, pengendalian internal, kecurangan akuntansi.

### I. PENDAHULUAN

Berdasarkan data dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menemukan temuan tentang Kecurangan pada tahun 2016, kecurangan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Rokan Hulu tentang pengadaan komputer untuk kegiatan E-Learning dari Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2014 untuk 32 Sekolah Dasar Kabupaten Rokan Hulu. Kecurangan yang dilakukannya adalah dengan mengarahkan para kepala sekolah sasaran kegiatan tersebut untuk membeli alat komputer dan perangkat E-Learning lainnya kepada rekanannya. Demi rekayasa tersebut, dia mendapatkan keuntungan hingga Rp. 300 juta dan tindakan tersebut tentu saja menyalahi aturan pengadaan yang diberlakukan kemendiknas yang

seharusnya dilakukan secara swakelola. Dimana dia telah memanfaatkan jabatan sebagai kepala dinas demi keuntungan pribadi nya semata dan bersifat serakah. ([www.bpk.com](http://www.bpk.com)) Temuan BPK yang serupa juga ditemukan pada tahun 2017, yaitu kecurangan atas penyelewengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rokan Hulu tahun anggaran 2017. Tindakan kecurangan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) dan Bendaharannya atas dana tagihan Penerangan Jalan Umum (PJU) untuk PT. PLN. Negara mengalami kerugian sebesar Rp. 693 Juta dari Rp.1.4 Milyar anggaran PJU yang seharusnya dibayarkan ke PT. Perusahaan Listrik Negara atau PLN. Namun mereka menyalahgunakan wewenang nya sebagai kepala dinas untuk

kepentingan pribadinya sehingga Negara mengalami kerugian.([www.bpk.com](http://www.bpk.com)).

Berdasarkan fenomena diatas perlakuan kecurangan terjadi dari tahun 2016 sampai tahun 2017 oleh sebab itulah penulis terdorong untuk meneliti mengenai pengaruh moralitas aparat dan asimetri informasi yang menjadi penyebab terjadinya kecurangan akuntansi di Kabupaten Rokan Hulu.

Dalam kasus terjadinya *disclaimer* terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu menandakan bahwa Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu harus memberikan perhatian khusus terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan pimpinan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) yang terlibat dalam kasus penyimpangan atau penyalahgunaan jabatan harus diberhentikan dari jabatannya. Semua ini bisa terjadi karena administrasi yang belum sesuai dengan peraturan, lemahnya sistem pengendalian internal dan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu yang tidak memberikan tindak lanjut terhadap tanggapan berbagai pihak. Seharusnya Bupati dapat mengoptimalkan fungsi Inspektorat Kabupaten Rokan Hulu, sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian internal pemerintah dan memperbanyak tenaga-tenaga dengan kualifikasi pendidikan akuntansi untuk menyusun sistem akuntansi keuangan daerah.

Moralitas aparat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kecurangan akuntansi. Organisasi atau instansi juga memiliki tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral dari manajemen organisasi mempengaruhi terjadinya perilaku kecurangan (*fraud*). Semakin buruk moralitas dari aparat maka perilaku kecurangan akan semakin besar. Moral yang buruk dari aparat diasumsikan dapat mendorong aparat berlaku curang dalam akuntansi. Kecurangan akuntansi sangat berkaitan dengan tingkat moralitas aparat karena hal tersebut merupakan perilaku yang ilegal.

Kecurangan ini terkadang juga terjadi karena ketidakselarasan informasi antara yang memberi perintah dengan orang yang menjalankan sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang mengakibatkan kerugian aset. Falikhatun (2007) menyatakan bahwa di beberapa organisasi, bawahan memiliki informasi lebih akurat yang dapat mempengaruhi pengukuran kinerja dibandingkan atasannya. Karena terjadinya asimetri informasi antara atasan dan bawahan dapat mempengaruhi laporan keuangan yang bisa menyebabkan kecurangan. Disebabkan karena seharusnya laporan keuangan tersebut penting bagi para pengguna eksternal terutama sekali karena kelompok ini berada dalam kondisi yang paling besar ketidakpastiannya. Hal ini juga terjadi di pemerintahan disaat proses penyusunan anggaran pemerintah daerah, dimana eksekutif mempunyai informasi lebih banyak tentang kinerja aktual, motivasi dan tujuan, yang berpotensi menciptakan *moral hazard* dan *adverse selection*, asimetri informasi terjadi karena legislatif tidak memiliki informasi yang mencukupi mengenai kinerja eksekutif, legislatif tidak pernah dapat merasa pasti bagaimana usaha eksekutif memberikan kontribusi pada hasil aktual pada suatu organisasi pemerintahan

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Aranta (2013), yang menemukan bahwa moralitas aparat dan asimetri informasi berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi. Peneliti menambahkan pengendalian internal sebagai variabel moderasi untuk mengetahui apakah dengan adanya pengendalian internal akan semakin memperkuat atau memperlemah pengaruh moralitas aparat dan asimetri informasi terhadap kecurangan akuntansi.

Objek penelitian ini adalah instansi pemerintah yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini dikarenakan Kabupaten Rokan Hulu sering terjadi beberapa kali kasus kecurangan akuntansi seperti yang sudah ditunjukkan pada fenomena di atas. Dengan demikian, penulis

memberi judul penelitian ini “**PENGARUH MORALITAS APARAT DAN ASIMETRI INFORMASI TERHADAP KECURANGAN AKUNTANSI, PENGENDALIAN INTERNAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI** ” Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penelitian selanjutnya.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### Teori Perkembangan Moral

Teori perkembangan moral yang sering dipakai dalam penelitian tingkat etika adalah model Kohlberg. Teori ini sangat relevan untuk menjelaskan mengenai moralitas aparat. Teori ini mempunyai pandangan bahwa penalaran moral merupakan landasan perilaku etis. Menurut Kohlberg (1971), tahapan perkembangan moral merupakan ukuran dari tinggi rendahnya moral seseorang berdasarkan perkembangan penalaran moralnya. Ia melakukan penelitian berdasarkan kasus dilema moral untuk mengamati perbedaan perilaku individu dalam menyikapi persoalan moral yang sama. Kemudian ia membuat klasifikasi atas respon dari setiap individu ke dalam enam tahap yang berbeda. Terdapat tiga tahapan perkembangan moral, yaitu tahapan *pre-conventional*, tahapan *conventional* dan tahapan *post-conventional*.

### Teori Agensi

Penggunaan teori keagenan telah dipergunakan secara luas baik di sektor privat maupun sektor publik. Para ekonom menggunakan struktur hubungan prinsipal dan agen untuk menganalisis hubungan antara perusahaan dengan pekerja (Faria and Silva, 2013). Sementara di sektor publik, teori keagenan dipergunakan untuk menganalisis hubungan prinsipal-agen dalam kaitannya dengan penganggaran sektor publik (Abdullah, 2012). Teori keagenan menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau lebih individu, kelompok

atau organisasi. Salah satu pihak (*principal*) membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit dengan pihak lain (*agents*) dengan harapan bahwa agen akan bertindak atau melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan *principal* (Jensen and Meckling, 1976).

### Teori GONE

Teori GONE adalah teori yang populer digunakan dalam penelitian fraud. Penelitian ini menggunakan teori GONE dari Jack Bologne (1993) sebagai dasar teori untuk meneliti faktor-faktor penyebab terjadinya perilaku fraud.

### Kecurangan Akuntansi (*Fraud*)

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2015), menjelaskan kecurangan akuntansi sebagai salah saji yang timbul dari kecurangan dalam pelaporan keuangan yaitu salah saji atau penghilangan secara sengaja jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan dan salah saji yang timbul dari perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva (seringkali disebut dengan penyalahgunaan atau penggelapan) yang berkaitan dengan pencurian aktiva entitas yang berakibat laporan keuangan tidak disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva entitas dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk penggelapan tanda terima barang atau uang, pencurian aktiva, atau tindakan yang menyebabkan entitas membayar barang atau jasa yang tidak diterima oleh entitas. Perlakuan tidak semestinya terhadap aktiva dapat disertai dengan catatan atau dokumen palsu atau yang menyesatkan dan dapat menyangkut satu atau lebih individu di antara pegawai atau pihak ketiga.

### Moralitas Aparatur Pemerintah

Moralitas berasal dari bahasa latin yaitu *mores* yang berarti kebiasaan. Moralitas berfokus pada perilaku manusia yang benar

dan salah, sehingga moralitas berhubungan dengan pertanyaan bagaimana seseorang bertindak terhadap orang lain (Jusup, 2001). Dengan kata lain, moralitas adalah tekad untuk mengikuti apa yang ada dalam hati manusia dan disadari sebagai kewajiban mutlak (Aranta, 2013). Secara umum moralitas adalah hal yang paling mendasar yang digunakan untuk menilai setiap tindakan atau perilaku individu yang bersifat rasional dan sesuai dengan hati nurani. Salah satu teori perkembangan moral yang banyak digunakan dalam penelitian etika adalah model Kohlberg. Kohlberg (1971) mengelompokkan tahapan perkembangan moral menjadi tiga tingkat yaitu *pre-conventional*, *conventional* dan *post-conventional*.

#### **Asimetri Informasi**

Salah satu kendala yang akan muncul antara principal dan agent adalah adanya asimetri informasi. Asimetri informasi ini timbul karena principal tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agent dan agent memiliki lebih banyak informasi mengenai perusahaan secara keseluruhan (Nasution dan Doddy, 2007). Asimetri informasi yang terjadi antara principal dan agent mendorong agent untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja agent. Hal ini memacu agent untuk memikirkan bagaimana angka akuntansi dapat digunakan sebagai sarana untuk memaksimalkan kepentingannya.

#### **Sistem pengendalian internal**

Pengendalian internal juga menyediakan informasi tentang bagaimana menilai kinerja perusahaan dan manajemen sebagai pedoman dalam perencanaan selanjutnya (Mulyadi, 2002).

Sistem pengendalian internal pemerintah terdiri dari lima unsur, yaitu

1. Lingkungan pengendalian, merupakan kondisi dalam instansi pemerintah yang dapat membangun kesadaran semua personil akan pentingnya pengendalian

suatu organisasi dalam menjalankan aktivitas yang menjadi tanggung jawabnya sehingga meningkatkan efektivitas pengendalian internal.

2. Penilaian risiko, merupakan kegiatan penilaian atas kemungkinan terjadinya situasi yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah yang meliputi kegiatan identifikasi, analisis, dan mengelola risiko yang relevan bagi proses atau kegiatan organisasi.
3. Kegiatan pengendalian, merupakan tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penerapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif.
4. Informasi dan komunikasi. Informasi merupakan data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, sedangkan komunikasi merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik.

### **III. METODOLOGI PENELITIAN**

#### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk mengukur dan menganalisis hubungan antara dua variabel independen, yaitu sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi, terhadap dua variabel dependen, yaitu keterhandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana kualitas sumber daya manusia, yang mencakup kompetensi, pelatihan, dan pengalaman, serta penggunaan teknologi informasi, seperti sistem informasi akuntansi dan perangkat lunak pelaporan, dapat

mempengaruhi efektivitas pengendalian internal akuntansi.

### **Jenis dan Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang diperoleh melalui kuesioner yang disebarakan kepada responden. Kuesioner ini dirancang untuk mengumpulkan informasi terkait dengan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, serta pengaruhnya terhadap keterhandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. Pertanyaan dalam kuesioner mencakup aspek-aspek seperti kompetensi sumber daya manusia, penggunaan sistem informasi akuntansi, dan efektivitas pengendalian internal. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini akan mengumpulkan data numerik melalui kuesioner yang disebarakan kepada responden di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Data yang diperoleh akan dianalisis secara statistik untuk menentukan sejauh mana variabel-variabel tersebut berkontribusi terhadap keterhandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan di pemerintah daerah, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam pengelolaan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi dalam konteks akuntansi publik.

### **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang mencakup 29 SKPD, yang terdiri dari berbagai entitas seperti Inspektorat, Badan, Dinas, dan Kantor. Setiap SKPD memiliki peran dan fungsi yang berbeda dalam pengelolaan keuangan daerah, sehingga menciptakan keragaman dalam praktik pelaporan keuangan dan pengendalian internal akuntansi. Dengan melibatkan seluruh SKPD, penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang

komprehensif mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keterhandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan di tingkat pemerintah daerah.

Dalam penelitian ini, pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode total sampling. Metode ini dipilih karena seluruh anggota populasi dianggap relevan dan penting untuk penelitian, sehingga tidak ada alasan untuk mengecualikan responden tertentu. Dengan menggunakan total sampling, semua pegawai yang terlibat dalam proses pelaporan keuangan di masing-masing SKPD akan dilibatkan sebagai responden. Hal ini memastikan bahwa data yang diperoleh mencerminkan pandangan dan pengalaman dari berbagai pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan daerah.

Proses pengumpulan data akan dilakukan melalui penyebaran kuesioner yang dirancang khusus untuk mengumpulkan informasi terkait dengan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, serta keterhandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan. Kuesioner ini akan mencakup pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kompetensi pegawai, pelatihan yang diterima, penggunaan sistem informasi akuntansi, serta efektivitas pengendalian internal.

Dengan melibatkan seluruh responden dari 29 SKPD, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan data yang representatif dan valid, sehingga analisis yang dilakukan dapat memberikan wawasan yang lebih akurat mengenai hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pengelolaan keuangan daerah, khususnya dalam meningkatkan keterhandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan melalui penguatan sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi.

Untuk menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini, digunakan teknik analisis statistik deskriptif dan inferensial. Analisis deskriptif berfungsi untuk memberikan gambaran umum mengenai

karakteristik responden dan variabel yang diteliti. Dalam konteks ini, analisis deskriptif akan mencakup penghitungan frekuensi, persentase, rata-rata, dan standar deviasi dari data yang dikumpulkan melalui kuesioner. Misalnya, analisis ini akan menggambarkan profil responden berdasarkan demografi seperti usia, pendidikan, dan jabatan, serta memberikan informasi tentang tingkat kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi di masing-masing SKPD. Dengan cara ini, peneliti dapat memahami konteks dan latar belakang data yang akan dianalisis lebih lanjut.

Sementara itu, analisis inferensial digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan yang lebih luas dari sampel yang diteliti dan menggeneralisasi hasilnya ke populasi yang lebih besar. Dalam penelitian ini, analisis inferensial akan mencakup beberapa metode statistik, antara lain:

1. **Analisis Regresi:** Digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen (sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi) terhadap variabel dependen (keterhandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan). Analisis regresi akan membantu menentukan seberapa besar kontribusi masing-masing variabel independen dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen.
2. **Uji t:** Digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata antara dua kelompok. Misalnya, peneliti dapat menggunakan uji t untuk membandingkan keterhandalan pelaporan keuangan antara SKPD yang memiliki tingkat pemanfaatan teknologi informasi yang tinggi dan yang rendah.
3. **Analisis Varians (ANOVA):** Digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata antara tiga kelompok atau lebih. Dalam konteks penelitian ini,

ANOVA dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah terdapat perbedaan signifikan dalam ketepatan waktu pelaporan keuangan berdasarkan kategori tertentu, seperti tingkat pendidikan pegawai atau jenis SKPD.

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah perangkat lunak statistik SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versi terbaru. SPSS dipilih karena kemampuannya dalam melakukan analisis statistik yang kompleks dengan antarmuka yang user-friendly, sehingga memudahkan peneliti dalam mengolah dan menganalisis data. Dengan menggunakan SPSS, peneliti dapat dengan mudah melakukan analisis regresi, uji t, dan ANOVA, serta menghasilkan output yang jelas dan informatif untuk mendukung kesimpulan penelitian.

Dengan pendekatan analisis yang sistematis ini, diharapkan penelitian dapat memberikan hasil yang valid dan reliabel, serta memberikan wawasan yang mendalam mengenai hubungan antara variabel-variabel yang diteliti dalam konteks pelaporan keuangan pemerintah daerah.

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **Hasil Penelitian**

##### **Gambaran Umum Obyek Penelitian**

Kabupaten Rokan Hulu adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, yang dijuluki dengan Negeri Seribu Suluk. Ibu Kota Rokan Hulu adalah Pasir Pengaraian. Dibentuk pada tanggal 12 oktober 1999, berdasarkan kepada UU Nomor 53 tahun 1999 dan UU No 11 tahun 2003 tentang perubahan UU RI No 53 tahun 1999, yang diperkuat dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 010/PUU-1/2004, tanggal 26 Agustus 2004.

##### **Deskriptif Statistik Variabel Penelitian**

Statistik deskriptif variabel penelitian digunakan untuk memberikan gambaran tentang tanggapan responden mengenai variabel-variabel penelitian, yang

menunjukkan jumlah dan persentase tanggapan pada tiap butir pernyataan masing-masing variabel.

Berdasarkan Tabel 4.6 dapat diketahui bahwa variabel moralitas aparatur pemerintah dalam penelitian ini diukur dengan 6 item pertanyaan memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 23,97 dengan nilai minimal sebesar 14, nilai maksimal sebesar 30, dan standar deviasi sebesar 3,90. Pada variabel asimetri informasi dalam penelitian ini diukur dengan 7 item pertanyaan memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 29,29 dengan nilai minimal sebesar 21, nilai maksimal sebesar 35, dan standar deviasi sebesar 3,23.

Pada variabel kecurangan akuntansi dalam penelitian ini diukur dengan 12 item pertanyaan memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 48,93 dengan nilai minimal sebesar 37, nilai maksimal sebesar 57, dan standar deviasi sebesar 4,04. Pada variabel pengendalian internal dalam penelitian ini diukur dengan 5 item pertanyaan memiliki nilai rata-rata (*mean*) sebesar 20,13 dengan nilai minimal sebesar 15, nilai maksimal sebesar 24, dan standar deviasi sebesar 2,12.

### Analisis Statistik Inferensial

Statistik inferensial membantu peneliti untuk mencari tahu apakah hasil yang diperoleh dari suatu sampel dapat digeneralisasi pada populasi (Sugiyono, 2015:207). Untuk itu sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan, maka dalam penelitian ini analisis data statistik inferensial diukur dengan menggunakan program *Warp PLS 6.0* mulai dari pengukuran model (*outer model*), struktur model (*inner model*) serta pengujian hipotesis.

### Pengukuran Model (Uji Kualitas Data)

Evaluasi model pengukuran (*outer model*) dilakukan untuk menilai reabilitas dan validitas dari indikator-indikator pembentuk konstruk laten. *Outer model* dengan indikator reflektif dievaluasi melalui analisis faktor konfirmatori

dengan menguji validitas konvergen dan validitas diskriminan.

### Hasil Pengujian Bias Metode Umum

Bias metode umum (*common method bias*) merupakan bias yang diakibatkan oleh adanya varian metoda sama atau *common method variance* yang mempengaruhi korelasi antara variable-variabel yang diukur dengan menggunakan metoda yang sama. Hasil uji metode bias umum dengan metode *full collinearity* VIF dikatakan tidak terjadi korelasi antar variabel apabila nilainya lebih rendah dari 3,3. Berikut hasil dari pengujian bias metode umum:

Pada Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa nilai *Full Colinearity* konstruk moralitas aparatur

pemerintah, asimetri informasi, kecurangan akuntansi, dan pengendalian internal. Seluruh variabel konstruk memiliki nilai "*Full Collin. VIF*" dibawah 3,3. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa konstruk moralitas aparatur pemerintah, asimetri informasi, kecurangan akuntansi, pengendalian internal bebas dari kolinearitas atau *common method bias*.

### Hasil Pengujian Validitas

Validitas atau kesahihan suatu instrumen adalah ukuran seberapa tepat instrumen tersebut mampu menghasilkan data sesuai dengan ukuran yang sesungguhnya ingin diukur (Mustafa, 2009:164). Untuk pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan *construct validity* yang terbagi atas 2 (dua) yakni validitas konvergen dan validitas diskriminan.

#### 1) Validitas Convergent

Validitas *convergent* dihitung dengan melihat skor *Average Variance Extracted (AVE)*. Nilai validitas *convergent* dikatakan sangat baik apabila skor AVR di atas 0,5 (Henseler, 2009).

Pada Tabel 4.8 dapat dilihat bahwa nilai *Average Variances Extracted (AVE)* konstruk

dari moralitas aparatur pemerintah, asimetri informasi, kecurangan akuntansi, dan pengendalian internal memiliki nilai di atas 0,50 (50%), artinya konstruk moralitas aparatur pemerintah, asimetri informasi, kecurangan akuntansi, dan pengendalian internal dari indikator-indikator dapat dijelaskan secara baik, serta memenuhi persyaratan validitas *convergent*.

## 2) Validitas Diskriminan

Validitas *discriminant* merupakan validitas yang selanjutnya, pengujian validitas ini

bertujuan untuk melihat apakah suatu item itu unik dan tidak sama dengan konstruk lain dalam model (Hulland, 1999). Validitas *discriminant* dapat diuji dengan dua metode yaitu dengan metode *Fornell-Larcker* dengan membandingkan *square roots* atas AVE dengan korelasi partikel laten dan *Cross-Loading* yang menyatakan bahwa semua item harus lebih besar dari konstruk lainnya.

### a) *Cross Loading*

Jika korelasi dengan item pengukuran lebih besar dari pada ukuran konstruk lainnya, maka akan menunjukkan bahwa konstruk laten memprediksi ukuran pada blok yang lebih baik dari pada ukuran pada blok lainnya.

### b) Akar Kuadrat (*Square Roots*)

*Average Variance Extracted (AVE)*  
Dalam metode ini nilai akar kuadrat AVE akan memberikan *maximum shared squares variances (MSV)* atau *average shared squares variances (ASV)*. Secara logika metode ini adalah sebuah konstruk laten akan menjelaskan varian yang lebih banyak di dalam pengukuran item

atau indikator dibandingkan dengan membaginya dengan konstruk yang lain. Validitas diskriminan yang baik ditunjukkan dari akar kuadrat AVE lebih besar dari korelasi antar konstruk laten di dalam model (Latan, 2014:91). Artinya nilai akar kuadrat AVE > dari korelasi antar konstruk laten. Untuk melihat hasil Validitas *discriminant* dengan melihat nilai Akar Kuadrat (*Square Roots*) *Average Variance Extracted (AVE)* adalah sebagai berikut:

Pada Tabel 4.9 dapat dilihat bahwa nilai Akar Kuadrat (*Square Roots*) *Average Variance*

*Extracted (AVE)* konstruk moralitas aparatur pemerintah, asimetri informasi, kecurangan akuntansi, dan pengendalian internal. Seluruh variabel konstruk dapat menjelaskan varian yang lebih banyak di dalam pengukuran item atau indikatornya sendiri dibandingkan dengan membaginya dengan variabel konstruk yang lain. Ini terlihat dari nilai akar kuadrat AVE lebih besar dari korelasi antar variabel konstruk laten di dalam model, sehingga nilai-nilai tersebut diatas dikatakan baik dan memenuhi syarat dari validitas *discriminant*.

## Hasil Pengujian Reabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk menguji seberapa konsisten seperangkat pengukuran mengukur secara konsisten suatu konsep yang diukur (Kuncoro, 2013:175). Apabila nilai *composite reliability* yang dihasilkan >0,70 (*confirmatory research*) maka semua konstruk dapat dikatakan reliabel. Reliabilitas menunjukkan stabilitas dan konsistensi instrumen pengukuran serta mengukur konsep studi sebagai berikut:

*Reliability*) konstruk moralitas aparatur pemerintah, asimetri informasi, kecurangan akuntansi, dan pengendalian internal memiliki nilai *composite reliability* di atas

0,70, yang artinya masing-masing variabel konstruk memiliki rata-rata korelasi antar item-item dalam pengujian model yang reliabel. Dapat disimpulkan bahwa, seluruh variabel konstruk memenuhi persyaratan reliabilitas.

### Evaluasi Model Struktural

Model struktural (*inner model*) merupakan model struktural untuk memprediksi untuk memprediksi hubungan kausalitas antar variabel laten. Untuk memprediksi hubungan kausalitas antar variabel laten dengan menggunakan Warp.PLS dapat diukur dengan koefisien determinasi, Model *Fit* dan *Quality Indexes* sebagai berikut:

#### Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi dapat dilihat dengan menggunakan *R-Squared* yakni berapa persentase variasi konstruk *endogen/criterion* dapat dijelaskan oleh konstruk yang mempengaruhi dalam hipotesis.

Pada Tabel 4.12 dapat dilihat bahwa nilai *koefisien determinasi* pada penelitian ini

sebesar 0,354 atau 35,4%. Artinya variabel konstruk moralitas aparatur pemerintah, asimetri informasi, dan pengendalian internal dapat mempengaruhi kecurangan akuntansi sebesar 0,354 (35,4%). Sedangkan sisanya 0,646 (64,6%) di pengaruhi oleh variabel atau faktor-faktor di luar model penelitian ini.

### Model *Fit* dan *Quality Indexes*

#### 1) Model *Fit*

Untuk mengevaluasi Model *Fit* dapat ditentukan oleh indikator *Fit* yang hasilnya sebagai berikut:

Berdasarkan Tabel 4.13 tersebut, dapat dilihat bahwa nilai *Average path coefficient* (APC) sebesar 0.257 dengan  $P=0.003$ , *Average R-squared* (ARS) sebesar 0.354 dengan  $P<0.001$ , *Average*

*adjusted R-squared* (AARS) sebesar 0.322 dengan  $P<0.001$ , ini dapat diartikan bahwa model peneliti mempunyai *fit* yang baik dikarenakan nilai APC, ARS, dan AARS memiliki nilai probability lebih rendah dari 0,05.

Pada Tabel 4.13 itu dapat dilihat *Average block VIF* (AVIF) sebesar 1.313, dan *Average full collinearity VIF* (AFVIF) sebesar 1.241, dimana ini dapat diartikan tidak ada masalah dengan multikolonieritas antar indikator dan antar variabel eksogen dikarenakan nilai AVIF dan AFVIF lebih rendah dari 3,3.

Pada Tabel 4.13 itu juga dapat dilihat *Tenenhaus Goodness of Fit* (GoF) sebesar  $0.415 > 0.36$ , ini menunjukkan bahwa kekuatan prediksi model adalah besar atau fit model sangat baik.

#### 2) *Quality Indexes*

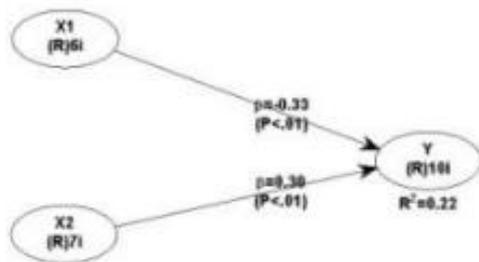
Untuk mengevaluasi *quality indexes* dapat ditentukan oleh indeks yang hasilnya pada

Tabel 4.13 tersebut. Untuk nilai *Indeks Sympton's paradox ratio* (SPR)= $0.750 > 0.7$ , masih dapat diterima. *R-squared contribution ratio* (RSCR)= $0.967 > 0.9$  masih dapat diterima. *Statistical suppression ratio* (SSR)= $1.000 > 0.7$  masih dapat diterima.

### Hasil Pengujian Hipotesis

#### Hasil Pengujian Hipotesis Tanpa Moderasi

Pengujian hipotesis tanpa moderasi ini adalah untuk menguji pengaruh langsung dari moralitas aparatur pemerintah, dan asimetri informasi dapat mempengaruhi kecurangan akuntansi yakni sebagai berikut:



**Gambar 4.1**  
**Model Persamaan Struktural dengan Path Coefficients dan P-value Untuk Hubungan Tanpa Moderasi**

**Tabel 4.14**  
**Rekapitulasi Hasil Pengujian Hipotesis Tanpa Moderasi**

Hipotesis	Uji Hipotesis	Path Coef	P-value	Keterangan
1	Moralitas Aparatur Pemerintah → Kecurangan Akuntansi (X1 Akuntansi) (Y)	-0,33	<0,005	Berpengaruh
2	Asimetri Informasi (X2) → Kecurangan Akuntansi (Y)	0,30	0,001	Berpengaruh

Sumber : Data Primer Diolah. Warp PLS, 6.0 (2020)

**1. Hasil Pengujian Hipotesis 1**

Berdasarkan Tabel 4.14 di atas dapat diketahui bahwa nilai *p-value* moralitas aparatur pemerintah terhadap kecurangan akuntansi sebesar <0,001. Nilai *P-value* <0,001 < 0,05 (level alpha 5%), maka dapat dikatakan bahwa moralitas aparatur pemerintah mempengaruhi kecurangan akuntansi. Untuk melihat arah pengaruh antara moralitas aparatur pemerintah dan kecurangan

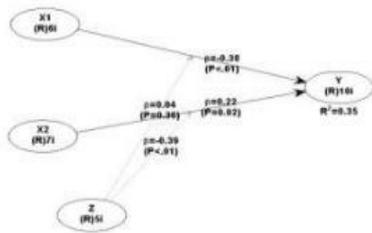
akuntansi dapat dilihat nilai koefisien jalur (*path coefficient*). Nilai koefisien jalur memiliki nilai negatif (-0,335), maka dapat dikatakan bahwa moralitas aparatur pemerintah berkorelasi negatif terhadap kecurangan akuntansi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa moralitas aparatur pemerintah mempengaruhi kecurangan akuntansi, dengan demikian Ha.1 diterima dan Ho.1 ditolak.

**2. Hasil Pengujian Hipotesis 2**

Berdasarkan Tabel 4.14 di atas dapat diketahui bahwa nilai *p-value* asimetri informasi terhadap kecurangan akuntansi sebesar 0,001. Nilai *P-value* 0,001 < 0,05 (level alpha 5%), maka dapat dikatakan bahwa asimetri informasi mempengaruhi kecurangan akuntansi. Untuk melihat arah pengaruh antara asimetri informasi dan kecurangan akuntansi dapat dilihat nilai koefisien jalur (*path coefficient*). Nilai koefisien jalur memiliki nilai positif (0,303), maka dapat dikatakan bahwa asimetri informasi berkorelasi positif terhadap kecurangan akuntansi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa asimetri informasi mempengaruhi kecurangan akuntansi, dengan demikian Ha.1 diterima dan Ho.1 ditolak.

**Hasil Pengujian Hipotesis Dengan Moderasi**

Pengujian untuk hipotesis berikut memperlihatkan hubungan antar model struktural *indirect effect* yang disertai variabel moderasi dan hasil interaksi variabel moderasi sebagai berikut:



**Gambar 4.2**  
**Model Persamaan Struktural dengan**  
**Path Coefficients dan P-value**  
**Untuk Hubungan Dengan Moderasi**

**1) Hasil Pengujian Hipotesis 3**

Pengujian hipotesis ketiga ini adalah untuk menguji pengaruh langsung dari moralitas

aparatur pemerintah dapat mempengaruhi kecurangan akuntansi dengan dimoderasi oleh pengendalian internal yakni sebagai berikut:

**Tabel 4.15**  
**Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga**

Path	Path Coeff.	Signifikansi	Effect Size
--> Y (Tanpa Variabel X1 Moderasi)	-0,335	<0,001	0,122
--> Y (Dengan Variabel X1 Moderasi)	-0,378	<0,001	0,137
X1*M --> Y (Interaksi Moderasi)	0,039	0,359	0,012

Sumber: Data Primer Diolah. Warp PLS, 6.0 (2020)

Berdasarkan tabel 4.15 tersebut dapat diketahui Jika dibandingkan nilai *path coefficients* model struktural *indirect effect* tanpa variabel moderasi, disertai variabel moderasi dan hasil interaksi variabel moderasi; terlihat bahwa sifat hubungan atau korelasi tidak konsisten yakni - 0,335

→ -0,378 → 0.039. Jika dilihat dari signifikansi model struktural *indirect effect* tanpa variabel moderasi dengan disertai variabel moderasi, serta hasil interaksi variabel moderasi dapat disimpulkan, bahwa variabel moderasi pengendalian internal terhadap hubungan moralitas aparatur pemerintah dengan kecurangan akuntansi yakni <0,001 (<0.05) → <0,001 (<0.05) → 0.359 (>0.05) artinya pengendalian internal tidak dapat memoderasi hubungan antara moralitas aparatur pemerintah dengan kecurangan akuntansi. Besar pengaruhnya dibuktikan juga dari perolehan nilai Effect Size dari 0,122 → 0,137 → 0.012. ( $f^2$  menunjukkan semakin melemah dan bahkan tidak memiliki pengaruh).

Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel moderasi “pengendalian internal” tidak memoderasi hubungan antara moralitas aparatur pemerintah dengan kecurangan akuntansi. Artinya, pengendalian internal tidak dapat mempengaruhi hubungan moralitas aparatur pemerintah dengan kecurangan akuntansi. Dengan demikian Ha.6 ditolak dan Ho.6 diterima.

**2) Hasil Pengujian Hipotesis 4**

Pengujian hipotesis keempat ini adalah untuk menguji pengaruh langsung dari asimetri informasi dapat mempengaruhi kecurangan akuntansi dengan dimoderasi oleh pengendalian internal yakni sebagai berikut:

**Tabel 4.16**  
**Hasil Pengujian Hipotesis Keempat**

Path	Path Coeff.	Signifikansi	Effect Size
--> Y (Tanpa Variabel X2 Moderasi)	0,303	0,001	0,101
--> Y X2 (Dengan	0,222	0,015	0,074

Variabel Moderasi)			
X2*M --> Y (Interaksi Moderasi)	-0,389	<0,001	0,155

Sumber: Data Primer Diolah. Warp PLS, 6.0 (2020)

Berdasarkan Tabel 4.16 tersebut dapat diketahui Jika dibandingkan nilai *path coefficients* model struktural *indirect effect* tanpa variabel moderasi, disertai variabel moderasi dan hasil interaksi variabel moderasi; terlihat bahwa sifat hubungan atau korelasi tidak konsisten yakni  $0,303 \rightarrow 0,222 \rightarrow -0.389$  (menunjukkan koefisien semakin memperlemah). Jika dilihat dari signifikansi model struktural *indirect effect* tanpa variabel moderasi dengan disertai variabel moderasi, serta hasil interaksi variabel moderasi dapat disimpulkan, bahwa variabel moderasi pengendalian internal terhadap hubungan asimetri informasi dengan kecurangan akuntansi yakni  $<0,001 (<0.05) \rightarrow <0,001 (<0.05) \rightarrow 0.359 (>0.05)$  artinya pengendalian internal dapat memoderasi hubungan antara asimetri informasi dengan kecurangan akuntansi. Besar pengaruhnya dibuktikan juga dari perolehan nilai Effect Size dari  $0,101 \rightarrow 0,074 \rightarrow 0.155$ . ( $f^2$  menunjukkan semakin kuat).

## V. PEMBAHASAN

### Pengaruh Moralitas Aparatur pemerintah (X1) Terhadap Kecurangan Akuntansi (Y)

Dari hasil uji hipotesis, diketahui bahwa moralitas aparat pemerintah berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi. Dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi moral aparat pemerintah, maka kecurangan akuntansi semakin turun. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan Wilopo (2006), Ariani, dkk. (2014) dan Puspasari dan Suwardi (2012) yang menyatakan bahwa semakin tinggi level

penalaran moral aparat maka aparat tidak berbuat kecurangan akuntansi.

### Pengaruh Asimetri Informasi (X2) Terhadap Kecurangan Akuntansi (Y)

Dari hasil uji hipotesis, diketahui bahwa asimetri informasi berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi, maka dapat disimpulkan dengan semakin tinggi asimetri informasi, maka semakin tinggi juga kecurangan akuntansi, begitu juga sebaliknya. Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wilopo (2006) yang membuktikan bahwa asimetri informasi memberikan pengaruh yang signifikan dan positif terhadap kecurangan akuntansi perusahaan,

### Pengaruh Moralitas Aparatur Pemerintah (X1) Terhadap kecurangan akuntansi (Y) Dimoderasi Oleh Pengendalian Internal (Z)

Dari hasil uji hipotesis yang dilakukan, diketahui bahwa pengendalian internal tidak memoderasi moral dan pengaruhnya terhadap kecurangan akuntansi. Mayoritas responden rata-rata memberikan jawaban yang menunjukkan bahwa moral aparat sudah cukup untuk mendorong terhindarnya kecurangan akuntansi, sehingga pengendalian internal tidak menjadi terlalu penting sebagai moderasi.

### Pengaruh Asimetri Informasi (X2) Terhadap kecurangan akuntansi (Y) Dimoderasi Oleh Pengendalian Internal (Z)

Dari hasil uji hipotesis, diketahui bahwa pengendalian internal memoderasi asimetri informasi dan pengaruhnya terhadap kecurangan akuntansi. Dengan rendahnya asimetri informasi maka kecurangan akuntansi semakin turun. Informasi dari pihak agen dan principal memang sangat membutuhkan pengendalian internal sehingga tidak ada salah satu pihak yang memiliki informasi lebih banyak dari pihak yang lainnya yang dapat menguntungkan pihak-pihak tertentu.

## Kesimpulan

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab I bahwa penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji seberapa besar pengaruh moralitas aparatur pemerintah dan asimetri informasi terhadap kecurangan akuntansi, pengendalian internal sebagai variable moderasi pada SKPD di Kabupaten Rokan Hulu. Berdasarkan analisis yang dilakukan pada bagian sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Moralitas aparatur pemerintah berpengaruh negatif terhadap kecurangan akuntansi.
2. Asimetri Informasi berpengaruh positif terhadap kecurangan akuntansi.
3. Pengendalian internal tidak dapat memoderasi hubungan antara moralitas aparatur pemerintah dengan kecurangan akuntansi.
4. Pengendalian internal dapat memoderasi hubungan antara asimetri Informasi dengan kecurangan akuntansi.

Dan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa :

1. Hasil penelitian menunjukkan hubungan negative moralitas aparat terhadap kecurangan akuntansi, yang berarti semakin rendah moral aparat, maka kecurangan akuntansi akan semakin tinggi, demikian juga sebaliknya.
2. Hasil penelitian menunjukkan hubungan positif asimetri informasi terhadap kecurangan akuntansi, yang berarti semakin tinggi asimetri informasi, maka kecurangan akuntansi semakin meningkat.

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas, maka peneliti menyarankan bahwa:

1. Saran Bagi Akademisi  
Disarankan untuk menjadikan hasil penelitian ini sebagai memberikan tambahan wacana penelitian empiris bagi akademisi dan pertimbangan untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Saran Bagi Instansi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu  
Disarankan untuk meningkatkan control dan disiplin para pegawai, serta melakukan suatu upaya peningkatan moral pegawai dan mengurangi terjadinya perbedaan informasi, sehingga kecurangan akuntansi dapat dikurangi.
3. Bagi Penelitian Selanjutnya  
Disarankan untuk meneliti faktor lain yang mempengaruhi kecurangan akuntansi seperti kontrol atasan, pemerataan informasi, etika atasan, disiplin dan lain- lain.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, disarankan agar akademisi menjadikan temuan ini sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut mengenai kecurangan akuntansi, dengan mengeksplorasi variabel-variabel lain yang mungkin berpengaruh, seperti budaya organisasi dan kepemimpinan. Instansi pemerintah Kabupaten Rokan Hulu perlu meningkatkan moralitas aparatur melalui program pelatihan dan pengembangan yang fokus pada etika kerja, serta memperkuat sistem pengendalian internal di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan meninjau dan memperbaiki prosedur yang ada. Selain itu, penting untuk meningkatkan transparansi informasi guna mengurangi asimetri informasi, serta menerapkan disiplin yang lebih ketat terhadap pegawai dengan sanksi tegas untuk pelanggaran etika dan prosedur. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kecurangan akuntansi, seperti kontrol atasan dan pemerataan informasi, serta melakukan studi kasus di daerah lain untuk membandingkan hasil dan menemukan perbedaan atau kesamaan dalam pengaruh moralitas aparatur dan asimetri informasi terhadap kecurangan akuntansi. Dengan menerapkan rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan dapat mengurangi kecurangan akuntansi di lingkungan pemerintah daerah dan meningkatkan akuntabilitas serta

transparansi dalam pengelolaan keuangan publik.

## VI. REFERENSI

- Abdul Halim dan Syukriy Abdullah, 2010, *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat Adriyani.
2011. *Pengaruh Asimetri Informasi, Stuktur Kepemilikan, Dan Rasio Profitabilitas Perusahaan Terhadap Manajemen Laba di PT BEI*, Skripsi S1 FE UNP
- Amrizal, 2014, Analisis Kritis Pelanggaran Kode Etik Profesi Akuntan Publik Di Indonesia. *Jurnal Liquidity*, Volume3, No. 1.
- Ambar, 2011, *Memahami Good Governance Dalam Perspektif Sumber Daya Manusia*, Yogyakarta: Gava Media
- Amin Widjaja. 2009. *Kecurangan Laporan Keuangan (Financial Statement Fraud)*, Jakarta : PT. Indeks.
- Arens et al, 2012, *Auditing: an Integrated Approach*, Edisi ke-6, New Jersey: Prentice Hall.
- Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian Edisi Revisi*. PT Rineka Cipta: Jakarta.
- Baldric , 2015, *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua)*, Yogyakarta: STIM YKPN
- BPKP. 1999. *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional oleh BPKP Tahun 1999*.
- COSO, 2013, *Enterprise Risk Management - Integrated Framework. The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*.
- Fera, 2018, melakukan penelitian Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Moralitas Individu, Kesesuaian Kompensasi dan Asimetri Informaasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris pada Karyawan Divisi Keuangan dan Garment PT Dan Liris Kabupaten Sukoharjo).
- Friskila, 2010, melakukan penelitian mengenai pengaruh Pengaruh Ketaatan Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern, Kesesuaian Kompensasi dan Moralitas terhadap Kecendrungan Kecurangan Akuntansi Pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Padang,
- Friskila Rini Sumiati. 2010. *Pengaruh Ketaatan Akuntansi, Sistem Pengendalian Intern, Kesesuaian Kompensasi Dan Moralitas Terhadap Kecendrungan Kecurangan Akuntansi (Fraud) Pada Badan Usaha Milik Negara di Padang*, Skripsi S1. FE UNP.
- Himmah Bandariy, 2011, Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Studi Pada Kabupaten Eks Karesidenan Banyumas. Skripsi. Universitas Dipenogoro Semarang.
- Ghozali, 2018, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 25*. Semarang: Universitas Dipenogoro
- Karyono. 2013. *Forensic Fraud*. Yogyakarta: Andi.
- Kurniawan, Ardeno, 2012, *Audit internal Nilai Tambah Bagi Organisasi*. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE
- Kusumastuti, 2012. melakukan penelitian Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi dengan Perilaku Tidak Etis Sebagai Variabel Intervening.
- Mulyadi, 2011, *Auditing Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Mudrajad Kuncoro, 2009, *Metodologi Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*, Edisi Ketiga, Jakarta: Erlangga
- Nani, 2010, Pengaruh sistem pengendalian intern, moralitas dan motivasi terhadap tingkat kecurangan dalam

- laporan keuangan pada SKPD di kota Padang.
- Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008  
Tentang System Pengendalian Internal
- Senja Miranti. 2011. *Pengaruh Asimetri Informasi, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba di PT BEI*, Skripsi S1. FE UNP.
- Tuanakotta,Theodorus, 2013, Mendeteksi Manipulasi Laporan Keuangan.Jakarta : Salemba Empat
- Uma Sekaran, Roger Bougie, 2017, Metode Penelitian untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan Keahlian, Jakarta: Salemba Empat
- Wilopo, 2006. *Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Kecendrungan Kecurangan Akuntansi Studi pada Perusahaan Publik dan Badan Usaha Milik Negara*, Publikasi SNA IX: Padang; tanggal 23-26 Agustus 2006
- Wilopo, 2006, Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kecendrungan kecurangan akuntansi pada BUMN dan perusahaan terbuka lainnya.